IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH INDUK NUWO SAMPAH (STUDI DI KELURAHAN REJOMULYO, KECAMATAN METRO SELATAN, KOTA METRO)

(Skripsi)

Oleh

ARBEN IRAWAN SETIAWAN.B
(1816021030)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE NUWO SAMPAH MAIN WASTE BANK PROGRAM (STUDY IN REJOMULYO KELURAHAN, METRO SELATAN DISTRICT, METRO CITY)

By
ARBEN IRAWAN SETIAWAN.B

Efforts in handling waste in urban areas are still a problem that has not been resolved. Increasing population growth has resulted in an increase in the level of public consumption, this of course has an impact on increasing the volume of waste generated as happened in a metro city. Heaps of garbage can still be found on the streets, in waterways, in rivers and others. This study aims to find out how the city government's efforts through the implementation of the nuwo garbage bank program are to overcome waste problems in Metro City, especially in the Rejomulyo village. This study uses the theory of policy implementation according to George C. Edward III, namely direct and indirect impact on implementation which is divided into four factors that influence the implementation of a policy, including; communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study uses a qualitative method. Data were obtained through interview, observation, and documentation studies, as well as using data analysis techniques according to Miles and Huberman. Test the validity of the data using triangulation. The results of this study indicate that the implementation of the Nuwo Garbage Bank program in Rejomulyo Village from the aspect of planning and supervision have not gone well. On the other hand, the practice in the field is considered to be still not optimal because it is influenced by several factors such as the lack of public awareness of waste management, the facilities and infrastructure provided are still inadequate, and the absence of incentives provided. There are several suggestions, namely improving facilities and infrastructure, providing incentives to program implementers, the role of the government must also be increased in socializing and fostering the waste bank program. Thus, people are more concerned about waste management and a green, clean, and comfortable environment.

Keywords: Implementation, Waste Bank, Metro City

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH INDUK NUWO SAMPAH (STUDI DI KELURAHAN REJOMULYO, KECAMATAN METRO SELATAN, KOTA METRO)

Oleh
ARBEN IRAWAN SETIAWAN.B

Upaya dalam penanganan sampah di perkotaan sampai saat ini masih menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat, hal ini tentu berdampak pada meningkatnya volume sampah yang dihasilkan seperti yang terjadi di kota metro. Timbunan sampah masih banyak ditemui di jalanan, di saluran air, di sungai dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah kota melalui implementasi program bank sampah nuwo sampah guna menanggulangi permasalahan sampah di Kota Metro khususnya di kelurahan rejomulyo. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Goerge C. Edward III yaitu *direct and indirect impact on implementation* yang terbagi menjadi empat faktor yang berpengaruh pada implementasi suatu kebijakan, antara lain; komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi program Bank Sampah Nuwo Sampah di kelurahan rejomulyo dari aspek perencanaan dan pengawasannya belum berjalan dengan baik. Pada praktek dilapangan dinilai masih belum optimal karena dipengaruhi beberapa faktor seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, sarana dan prasarana yang diberikan masih kurang memadai, serta belum adanya insentif yang diberikan. Ada beberapa saran yaitu meningkatkan sarana dan prasarana, memberikan insentif kepada pelaksana program, peran pemerintah juga harus ditingkatkan dalam sosialisasi dan pembinaan program bank sampah. Sehingga, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap pengelolaan sampah dan lingkungan yang hijau, bersih, dan nyaman.

Kata Kunci : Implementasi, Bank Sampah, Kota Metro

IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH INDUK NUWO SAMPAH (STUDI DI KELURAHAN REJOMULYO, KECAMATAN METRO SELATAN, KOTA METRO)

Oleh

ARBEN IRAWAN SETIAWAN.B

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul	:	**IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH INDUK NUWO SAMPAH (STUDI DI KELURAHAN REJOMULYO, KECAMATAN METRO SELATAN, KOTA METRO)**
Nama Mahasiswa	:	Arben Irawan Setiawan.B
No Pokok Mahasiswa	:	**1816021030**
Jurusan	:	**Ilmu Pemerintahan**
Fakultas	:	**Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP	**Bendi Juantara, S.IP, M.A**
NIP. 19611218198902100	NIP. 198809232019031011

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP. 19611218198902100

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP** .....

Sekretaris : **Bendi Juantara, S.IP, M.A** .....

Penguji : **Budi Harjo, S.Sos, M.IP** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071978032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **12 Agustus 2022**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan

Arben Irawan Setiawan.B

NPM. 1816021030

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Arben Irawan Setiawan.B, tempat tanggal lahir Metro 03 Januari 2000. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Bustami, dan Ibu Komariah. Memiliki dua orang adik perempuan bernama Adithiya Komala Dewi dan Annisa Putri, Jenjang pendidikan Penulis dimulai pada tahun 2005-2006 di TK Kartika II 29 Metro, dilanjutkan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Metro Pusat pada tahun 2006-2012. Setelah lulus Sekolah Dasar Negeri (SDN), pada tahun 2012-2015 Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 Kota Metro. Selanjutnya pada tahun 2015-2018 Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Kota Metro. Kemudian pada tahun 2018 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama Penulis melaksanakan studi pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, berbagai kegiatan diikuti baik akademik maupun non-akademik demi menunjang kapasitas diri Penulis. Pada tahun 2019 Penulis mengikuti Latihan Kader 1 (*Basic Training*) Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung dan resmi tergabung menjadi anggota biasa HMI Komsospol Unila. Pada tahun 2019-2020 Penulis menjadi bagian dari Anggota Biro 4 HMJ Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2020 akhir, Penulis dipercayakan memegang amanah menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Periode 2020/2021.

Penulis sempat melaksanakan Kuliah Keja Nyata (KKN) selama 40 hari secara berkelompok selama 40 hari. Secara pembagian kelompok penulis melaksanakan

KKN sesuai dengan domisili tempat tinggal. Karena pada saat itu, terbentur dengan pandemic Covid-19 yang adanya pembatasan untuk melangsungkan KKN di Desa yang telah ditentukan oleh lembaga (BPKKN) Unila. Penulis juga ikut serta dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL), yang dalam hal ini kegiatan PKL penulis dilaksanakan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung.

Demikian segelintir aktivitas Penulis pada masa perkuliahan, sejak rentang tahun 2018-2022. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha merupakan kinerja Penulis yang bertujuan sebagai jalan menuju hidup yang lebih bermanfaat.

MOTTO

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya”

(QS Al-Baqarah: 286)

“Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya”

(Q.S An-Najm Ayat 39-40)

"Perjuangan tidak hanya membuat kita menjadi orang yang lebih kuat, lebih baik dan lebih bijaksana, mereka juga membuat kita belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri dan tujuan hidup."

(Auliq Ice)

“Kalem Aja Lanjut Terus”

(Arben Irawan Setiawan.B)

Beriman, Berilmu, Beramal. Yakin Usaha Sampai

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhiar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumil Akhir

dan

Ku persembahkan karya ilmiah sederhana ini teruntuk …

Umi dan Buyah tercinta

Komariah dan Bustami

Yang tak henti ber-Ikhtiar dan ber-Doa demi keberlangsungan Anakmu menjalani hidup, beribu terimakasih tak dapat membalas semua jasamu demi membesarkan putra tersayang menjadi insan yang berguna.

Terimakasih untuk semua yang mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillaahirrohmaanirrohim.

Syukur Penulis haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Implementasi Program Bank Sampah Induk Nuwo Sampah (Studi di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro)". Sanjungan shalawat dan tak khilaf tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya, serta telah mengubah sejarah kehidupan kegelapan menjadi alam yang terang benderang sampai saat ini.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam penyusunan skrispi ini Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang Penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada, tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik.

Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Kepada Allah SWT atas segala apa yang Engkau berikan kepada hambamu yang selalu khilaf atas segala nikmat-Mu. Terima kasih atas segala limpahan

nikmat sehat, nikmat iman, nikmat islam yang selalu tercurah dalam setiap proses hidup yang hamba jalani, terimakasih atas kebesaran-Mu yang selalu memberikan kedamaian jiwa, serta hati yang lapang dalam menempuh kesulitan dihadapi.

2. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus Dosen Pembimbing Utama penulis dalam membuat skripsi ini. Terima kasih atas segala saran, kritik, dan motivasi dan segala bimbingan yang luar biasa yang sangat membantu Penulis dalam proses penulisan skripsi Penulis, sehingga skripsi Penulis terselesaikan dengan baik. Terima kasih pak, semoga Allah SWT selalu melindungi langkah bapak dan selalu diberikan kesehatan..
5. Bapak Bendi Juantara, S.IP, M.A. selaku Dosen Pembimbing Pembantu. Terima kasih atas segala saran, kritik, dan motivasi dan segala bimbingan yang luar biasa yang sangat membantu Penulis dalam proses penulisan skripsi Penulis, sehingga skripsi Penulis terselesaikan dengan baik. Terima kasih pak, semoga Allah SWT selalu melindungi langkah bapak dan selalu diberikan kesehatan.
6. Bapak Budi Harjo, S.Sos, M.IP. selaku Dosen Pembahas. Terima kasih atas segala saran dan kritik yang luar biasa yang sangat membantu dalam proses penulisan skripsi Penulis sehingga saat ini skripsi Penulis terselesaikan dengan baik. Terima kasih banyak pak, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan untuk bapak berserta keluarga.
7. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingannya selama ini, semoga bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu

semua. Penulis sangat bersyukur dapat diajarkan oleh bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam hidup Penulis.

9. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Mbak Shella, Mas Juni, dan Bang Puput. Terima kasih sudah bersedia direpotkan dalam urusan administrasi perkuliahan, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT.
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, Ketua Bank Sampah NUSA Kelurahan Rejomulyo, Ketua Pokja PKK Kelurahan Rejomulyo, dan Masyarakat (Nasabah Bank Sampah NUSA Kelurahan Rejomulyo). Terima kasih telah bersedia dan meluangkan waktunya sebagai informan dalam penelitian ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan.
11. Kedua orangtua tercinta, Umi Komariah dan Buyah Bustami. Terima kasih untuk segala doa yang telah dicurahkan untukku, baik dalam proses penelitian maupun yang lainnya, serta untuk kerja kerasnya untuk menjadikan penulis menjadi insan yang berpendidikan tinggi dan bermanfaat bagi orang lain. Ucapan terimakasih tidak mampu membalas semua tetesan keringat dan do'a yang tak terhenti terpanjat untuk membesarkan putramu tersayang menjadi seseorang yang berguna sesuai harapan Umi dan Buyah. Bersimpuh maaf atas kesalahan yang pernah terwujud, dan maaf untuk air mata yang pernah keluar atas tindakanku. Berjuta terimakasih tidak akan terbalas untuk semua jasa Umi dan Buyah. Semoga setiap langkahku membawa kebaikan dan kebahagiaan untuk Umi dan Buyah, serta ilmu yang didapat dari pendidikanku dapat bermanfaat bagi orang lain dan dapat menjadi amal jariyah untuk Umi dan Buyah. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun Umi dan Buyah berada, dan semoga keberhasilan dalam hidup senantiasa Allah SWT berikan dalam hidupku agar diriku dapat terus menciptakan senyum bahagia di wajah Umi dan Buyah tersayang.
12. Untuk Kedua Adikku Adithiya Komala Dewi & Annisa Putri, jadilah pribadi yang lebih baik lagi dan satu pesan tuan untuk kalian hubungan terbaik di

semesta adalah hubungan kakak dan adik. Tidak ada perpisahan, tidak ada ketakjujuran, tidak ada patah hati. Sebaliknya, cinta yang luar biasa, kepedulian yang efektif, dan loyalitas yang berlebihan. Semoga kita menjadi orang yang berhasil dan dapat membanggakan Umi dan Buyah, Aamiin.

13. Sahabat-sahabat KTA, dalam keheningan menjalar waktu, melewati beratus-ratus siang dan juga petang, dengan segenap asa yang kupaksa membentang. Beragam cerita yang telah diukir bersama di sudut memori, canda dan tawa yang seingatku tak pernah luput menghiasi, sekumpulan kenangan yang terus menari tiada henti, yang selalu menemani, memahami, membersamai penulis hingga saat ini. Untaian terimakasih penulis haturkan, telah membersamai menjadi teman, sahabat, adik, dan keluarga yang baik bagi penulis. Mpi, Memy, Nuy, Aldy, dan Rahman Semoga hubungan kita terus terjaga dengan baik kedepannya dan semoga Allah SWT selalu melindungi dimanapun kalian berada.
14. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018. Nendi Aji Pangestu, Fran Aris Munanda, Alviki, KGS M Hasanal Hafiz C, Aldy Nadiantara., Rahmando, Al Fadilah Syahadi, M Kevin Sopian, Ananda Alhuda A.F., M Alpha Abistha, Agung Yuda Pratama, Aditya ramadhan, Ardi Ariwijaya, Tedi syah, Algyfhary Gymnastiar, Galih, Bagas, Muarif. Selanjutnya Fitriana Syahwa, Fauzan Isnia Puspita, Sofia Tri Mulya, Fauzan Isnia, Maylinia Ajeng Sevira, Ayu Nandini, Ayu Safitri, Tharesa Primula, Michelle Adellina, Ririn Anjarwati, Hestiantina Effendi, Bella Lesta, Ranti Aprilia, Amalia Kartika, Melinia, Dian Risma, Rifdah Rahadatul Aisy, Widya Suryani, Hani, Tiara Zulfa, Destia Natalia R, Tasya Kamila, Diana Amalia, Tania Lorenza, Lili Rahma, Tika selvira, dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu. Terimakasih sudah mengisi hari-hari penulis di kampus dan berproses bersama dari awal menjadi mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa akhir sampai sekarang. Semoga kita dipertemukan lagi dilain kesempatan dan semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan membanggakan keluarga.
15. Untuk Nida Fauziah, Risky Prayogi, Sendy Nur Ahmad Effendi, Alvicki Hidayat, dan Fran Aris Munanda (beserta jajaran anak konven lainnya).

Kepada mahasiswa akhir yang ganteng dan cantik, saya cuma mau bilang semangat ya ngerjain skripsinya, ga ada skripsi yang sempurna, adanya skripsi yang baik. Skripsi yang baik ya skripsi yang selesai, jadi skripsi kalian harus selesai biar bisa jadi skripsi yang baik.

16. Keluarga Besar HMJ Ilmu Pemerintahan Periode 2020/2021. Nurotul Azizah, Fitriana Syahwa, Ayu Nandini, Aldy Nadiatara, M Kevin Sopian, Agung Yuda Pratama, dan adik-adik pengurus lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih telah menjadi keluarga kecil yang memberi kehangatan, bertukar pikiran dan banyak pelajaran yang berharga bagi penulis, semoga hubungan kita terus tejaga dengan tetap baik kedepannya, semoga Allah SWT selalu melindungi dimanapun kalian berada.
17. Adik-adik Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019, Bagas Mulya, Restu Nanda Syahputra, Ayandra Muhammad Azra, Rizki Ramadhan, Dito Pratama, Daffa Adhipramana, Ananda Meidina, Lutfia Rahma Quinsafira, Agnessya Noulis, Allifasha Putri R, Fitri Handayani, Widia Nurmalasari, Widya Siregar, Roro Ayu, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih sudah memberikan penulis banyak pelajaran yang berharga. semoga Allah SWT selalu melindungi dimanapun kalian berada.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan pada Penulis. Akhir kata Penulis menyadari, masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi Penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2022

Arben Irawan Setiawan.B

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang dan Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Manfaat Penelitian 9

II.TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Implementasi 10
2.1.1 Pengertian Implementasi 10
2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan 12
2.1.3 Tahapan Implementasi Kebijakan 15
2.2 Pengelolaan Sampah 19
2.2.1 Pengertian Pengelolaan Sampah 19
2.2.2 Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah 20
2.3 Bank Sampah 22
2.3.1 Pengertian Bank Sampah 22
2.3.2 Manajemen Bank Sampah 23
2.3.3 Manfaat Bank Sampah 24
2.3.4 Peranan Bank Sampah 24
2.3.5 Tahapan Mendirikan Bank Sampah 24

2.4 Kerangka Pikir 26

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian 30
3.2 Fokus Penelitian 30
3.3 Informan 32
3.4 Jenis dan Sumber Data 33
3.5 Teknik Pengumpulan Data 33
3.6 Teknik Pengolahan Data 35
3.7 Teknik Analisis Data 35
3.8 Teknik Keabsahan Data 36

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kota Metro 38
4.1.1 Kondisi Geografis 38
4.1.2 Visi & Misi Kota Metro 40
4.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro 42
4.2.1 Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro 42
4.2.2 Tugas Pokok & Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro 42
4.2.3 Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro 43
4.2.4 Struktur Jabatan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro . 44
4.2.5 Visi & Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro 45
4.3 Gambaran Umum Bank Sampah NUSA Kota Metro 49
4.3.1 Sejarah Bank Sampah NUSA 49
4.3.2 Pengelolaan & Fasilitas Bank Sampah 50
4.3.3 Struktur Kelembagaan 52
4.3.4 Tata Kelola Bank Sampah NUSA 55

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Program Bank Sampah Nuwo Sampah 59
5.1.1 Indikator Komunikasi 59
5.1.2 Indikator Sumber Daya 66
5.1.3 Indikator Disposisi 72

5.1.4 Indikator Struktur Birokrasi 76

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan..... 82

6.2 Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Penelitian Terdahulu..... 7
4.1 Struktur Jabatan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro 44
4.2 Tugas dan Fungsi Pengurus Bank Sampah NUSA 52
5.1 Sosialisasi Program Bank Sampah 60
5.2 Nama-Nama Nasabah Bank Sampah NUSA Kelurahan Rejomulyo 61
5.3 Daftar Nama Pengurus Bank Sampah NUSA Kelurahan Rejomulyo..... 66
5.4 Infrastruktur Penunjang Bank Sampah NUSA..... 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Kerangka Pikir 29
4.1 Bagan Struktur Kepengurusan Bank Sampah Induk NUSA 52
5.1 Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan bank sampah 60
5.2 Fasilitas Kendaraan Pengangkut Sampah 70
5.3 Proses Penimbangan Sampah 77
5.4 Mekanisme Bank Sampah 78

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah lingkungan saat ini menjadi salah satu masalah penting yang cukup disoroti di berbagai negara. Permasalahan lingkungan yang terjadi bisa disebabkan banyak hal, salah satunya yaitu masalah sampah. Keberadaan sampah tentunya mempunyai dampak negatif jika pengelolaannya buruk, diantaranya dapat mengakibatkan pencemaran dan ancaman bagi kesehatan. Sampah bukan lagi merupakan masalah baru yang terjadi di Indonesia. Permasalahan sampah ataupun kebersihan selalu hangat diperbincangkan dan selalu menjadi sorotan di setiap daerah di Indonesia. Sampah membuat pemandangan yang kurang baik terhadap kebersihan dan keindahan kota. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah yaitu sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yamg terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejeniis sampah rumah tangga.

Pencemaran lingkungan akibat perindustrian maupun rumah tangga sangat merugikan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak negatif sampah bagi manusia dan lingkungannya diantaranya dampak bagi kesehatan. Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat, tikus, anjing yang dapat menimbulkan

penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan yaitu penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit). Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita. Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernakan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan atau sampah. Sampah beracun, contoh raksa (Hg) berasal dari sampah yang dibuang ke laut oleh pabrik yang memproduksi baterai dan akumulator.

Salah satu penyebab yang membuat sampah itu menjadi susah untuk dihilangkan adalah kurangnya kesadaran dari orang - orang untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia dan sampah tidak dapat dipisahkan. Manusialah yang menyebabkan adanya sampah dengan berbagai kepentingannya, mulai dari urusan rumah tangga, kantor, pasar, maupun industri. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan karena pengelolaan persampahan yang kurang memadai. Dampak sampah terhadap keadaan sosial dan ekonomi yaitu dengan pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, misalnya: bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran dimana-mana. Oleh karena itu sampah menjadi salah satu masalah yang memerlukan penanganan yang tepat, karena jika tidak ditangani dengan baik masalah sampah ini akan menjadi masalah yang serius dan merugikan manusia.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu paradigma kumpul-angkut-buang menjadi pengeloaan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan

penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan timbunan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang dikenal dengan sebutan *Reduce*, *Reuse dan Recycle (3R)* melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram.

Setiap daerah harus memiliki komitmen untuk menyelesaikan masalah sampah. Permasalahan sampah tidak hanya bisa diselesaikan oleh hibah peralatan tetapi juga dibutuhkan kemauan daerah untuk mengelolanya. Persoalan sampah ternyata bukan hanya persoalan yang ada pada perkotaan atau ibukota saja namun hampir seluruh daerah perkotaan di Indonesia, tidak lepas dari masalah sampah tersebut, termasuk Kota Metro. Kota Metro merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Lampung. Kota Metro juga tidak terlepas dari masalah persampahan. Metro pernah termasuk salah satu kota bersih di Provinsi Lampung dan mendapatkan piala adipura. Namun saat ini, Kota Metro tidak lagi terdengar menjadi kota yang bersih. Kota Metro, sebagaimana pula kota-kota lainnya yang berada di Indonesia, menghadapi masalah yang relatif sama meskipun tingkat intensitasnya yang berbeda. Masalah-masalah tersebut antara lain: sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, limbah industri, limbah yang berasal dari tempat pelayanan masyarakat seperti rumah sakit, rumah bersalin, pasar, pusat perbelanjaan dan pertokoan, hotel/penginapan, rumah makan/restoran. Secara umum, dapat dikatakan bahwa Kota Metro masih menghadapi masalah terkait dengan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.

Masalah sampah menjadi salah satu hal krusial yang dihadapi kota Metro, padahal kota itu termasuk yang jumlah penduduk dan luas wilayahnya kecil. Dengan jumlah penduduk sekitar 160.000 jiwa, Kota Metro memproduksi sampah 102,71 ton per hari, dan rata-rata perkiraan 80 ton/hari yang masuk ke pembuangan akhir sampah (TPAS) di Karang Rejo. Luas TPS Karang Rejo sekitar 14 hektare, dan baru 7 hektare di antaranya dimanfaatkan sebagai lahan penampungan sampah. Sedangkan

sisa lahan lainnya digunakan tempat pengembangan dan pengelolaan TPAS.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Metro, pengelolaan sampah di TPAS Karang Rejo belum memenuhi standar minimal pengelolaan sampah, dan sampah diolah secara konvensional. Hanya sebagian kecil tumpukan sampah mampu ditimbun menggunakan tanah.

> ”Sampai hari ini Metro belum dapat memenuhi standar pengelolaan sampah," kata Sekretaris DLH Kota Metro Yerri Noer Kartiko . Menurut dia, secara teknis pengelolaan sampah di TPAS Karang Rejo sangat riskan. Tidak hanya dari emisi gas methane dan kemungkinan adanya pencemaran air tanah dan sungai yang disebabkan cairan sampah, namun juga tumpukan sampah yang rawan longsor.”

Selain itu, masalah lain berupa kebakaran dan kecelakaan kerja sangat mungkin terjadi. Di sisi lain, pemilahan sampah di TPAS Karang Rejo sedikit terbantu dengan adanya para pemulung. Melihat kondisi tersebut, dirasa sangat perlu melakukan intervensi alternatif dengan harapan dapat mengulur usia TPAS Karang Rejo. Mengingat, bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak pula pada peningkatan volume sampah jika penangannya hanya sebatas dengan cara dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke TPAS. Melihat ancaman sampah yang kian mengkhawatirkan, upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan membenahi tata kelola TPAS, misalnya menutup sementara sel yang lama, sembari memanfaatkan gas methanenya dan membangun sel baru.

Selain itu, mendorong unit usaha Bank Sampah di setiap kelurahan yang dikelola pemerintah dengan swadaya masyarakat, membuat pusat daur ulang sampah dan tempat pemrosesan sementara dengan prinsip 3R (*reduce, reuse and recycle*), hingga aturan tegas tentang sampah. Tak kalah penting, semua warga harus bisa mengurangi produksi sampah hingga volume yang masuk ke TPAS berkurang. Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Lampung, Kota Metro memiliki peluang lebih besar melepas diri dari ancaman sampah. Melihat, luas Metro hanya 68,74 km2, terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Dengan begitu, peluang menciptakan sistem penanggulangan sampah dapat lebih efektif dan efisien.

Bank pengelolaan sampah menciptakan cara pengelolaan sampah yang baru, sedangkan pengelolaan yang lama yaitu sampah, kumpul, angkut buang. Pengelolaan yang baru yaitu menggunakan pendekatan melalui *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah) atau disebut juga 3r adalah segala aktivitas masyarakat untuk mengurangi sampah, penggunaan kembali sampah untuk fungsi sama atau fungsi lain yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan produk baru. Sampai tidak lagi dipandang barang yang tidak bermanfaat atau tidak berguna, akan tetapi melalui pendekatan 3r sampah dapat dijadikan sesuatu yang bernilai tambah jual yang tinggi.

> ”Wali Kota Metro, Wahdi Siradjuddin melaksanakan launching Bank Sampah Induk NUwo SAmpah (NUSA). Launching dilakukan di Aula TP PKK Kota Metro, Jumat (25/02/2022). Ketua TP-PKK Kota Metro Silfia Naharani, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2022, merupakan kerja sama dari TP PKK, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan Kota Metro.”

Menurut dari berita diatas bahwa Kota Metro baru saja meresmikan Bank Sampah dalam upaya pengelolaan sampah yang ada di Kota Metro. Bank Sampah NUSA merupakan gerakan sampah menjadi rupiah. Artinya, sampah dengan jenis seperti plastik, logam, hingga besi dikumpulkan kemudian dijual, hasil dari penjualan diberikan ke masyarakat yang menjualnya. Bank sampah ini merupakan satu bentuk upaya dalam penanganan sampah Kota Metro. Pemahaman yang diharapkan dari masyarakat tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tetapi harus lebih luas lagi, yakni memilah sampah organik maupun non organik, sebelum ke tempat pembuangan sampah.

Adanya bank sampah bagi kalangan umum masih terasa asing bagi individu yang belum bisa merasakan manfaat dengan adanya sampah, karena dengan bank sampah kita dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat dan alam sekitar. Salah satunya ialah dengan memproduksi ulang sampah. Produksi merupakan sebuah proses yang lahir seiring

dengan keberadaan manusia di muka bumi. Karena produksi berprinsip bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi.

Sebagai contoh bank sampah yang telah sukses yakni bank sampah Handayani di Yogyakarya, bank sampah ini milik perseorangan Saat ini Bank Sampah telah memiliki sekitar 2.500 nasabah di tahun 2017. Warga yang menjadi nasabah bisa datang ke lokasi bank sampah untuk menukarkan sampah dan mengisi tabungan di Bank Sampah Handayani. Jumlah nasabah juga terus meningkat karena potensi pemanfaatan sampah daur ulang di Yogyakarta cukup tinggi. Masyarakat juga diberikan pengetahuan untuk mulai memilah dan memilih sampah-sampah berdasarkan nilai daur ulang. Hampir semua sampah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan daur ulang mulai dari sampah plastik untuk kerajinan tangan, sampah organik untuk diolah kembali menjadi pupuk, sampah koran atau kertas yang diubah menjadi sandal koran dan lain sebagainya. Untuk menjual hasil produk olahan, Handayani juga melakukan diskusi ke beberapa hotel dan penginapan untuk membeli sandal hotel yang berasal dari olahan sampah daur ulang. Kemudian, petani-petani lokal juga diharapkan dapat membeli pupuk organik dari BS. Pendekatan secara birokrasi dan sosialisasi ditempuh untuk memaksimalkan penjualan produk hasil olahan. Bank sampah Handayani patut menjadi inspirasi bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia tentang besarnya potensi yang bisa dihasilkan dari pengolahan sampah yang baik dan benar. Selain mengembangkan pendapatan ekonomi masyarakat, juga dapat menjadi solusi untuk menanggulangi permasalahan sampah yang ada di Indonesia.

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Abdul Rozak/ 2014	Peran Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) Dalam Pemberdayaan Perekonomian Nasabah	Peran Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) dalam meningkatkan perekonomian nasabahnya dapat dikatakan tidak terlalu signifikan, ini berdasarkan hasil dari tabungan sampah dan penjualan barang kerajinan yang jumlahnya masih relatif kecil, yakni sebesar Rp. 18.575/nasabah setiap bulannya.
2	Fika Fitriasari/ 2016	Analisis Pengaruh Bank Sampah Malang (BSM) Terhadap Pendapatan Masyarakat Kota Malang	Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Tabungan Bank Sampah Malang tidak Mempengaruhi Pendapatan Masyarakat Kelurahan Gading Kasri. Hal ini mengindikasikan bahwa tabungan BSM belum menjadi sumber pendapatan utama Masyarakat Kelurahan Gading Kasri.
3	Imelda Merry Melyanti/ 2014	Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society, dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo	Dilihat dari prepektif, dari adanya kemitraan ini ketiga aktor mendapatkan manfaat masing-masing baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari pihak pemerintah, manfaat yang diterima yaitu adanya perubahan perilaku pedagang menjadi lebih bersih serta kondisi lingkungan pasar yang juga bersih, sehingga keberadaan pasar baru sebagai icon kota Probolinggo lebih banyak diminati pembeli.
4	Asdriyandi Juliandoni /2013	Pelaksanaan Bank Sampah Dalam Sistem Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan tahun 2013	pelaksanaan Bank Sampah di kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan dengan menggunakan sistem pengelolaan sampah belum sesuai dengan Perda Kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2004.

5	Syafa'atur Rofi'ah /2013	Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah (Studi di Bank Sampah Surolaras, Suronatan, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta	menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah meliputi sosialisasi, pemetaan wilayah, perencanaan, pelatihan, dan proses penanganan di tempat, proses pengumpulan sampah, proses pengangkutan sampah, proses pengelolaan sampah

(Sumber : Data diolah Peneliti 2022)

Melihat Kelima penelitian di atas, kajian tentang Pengelolaan sampah melalui Program Bank Sampah penulis mencoba memberikan perbedaan-perbedaan dengan penelitian yang telah ada. Ada pun yang membedakan nya pertama dari tempat yang diteliti dan yang lebih menekankan pada implementasi dari program bank sampah.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik meneliti lebih dalam mengenai implementasi program bank sampah dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Metro dan pengurus bank sampah induk Nusa KotavMetro dalam menangani masalah sampah di Kota Metro, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul "Implementasi Program Bank Sampah Induk Nuwo Sampah (Studi di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro)"

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, berdasarkan dari latar belakang di atas, yaitu: Bagaimana Implementasi Program Bank Sampah Induk Nuwo Sampah Di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Implementasi Program Bank Sampah Induk Nuwo Sampah Di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan bidang ilmu pemerintahan yang mengkaji masalah Implementasi Program terutama dalam hal melalui Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan dan referensi kepada Pemerintah Daerah dalam Implementasi Program dalam pengelolaan sampah agar menjadikan Kota Metro menjadi Kota yang bersih.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan" Menurut Syaukani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana mengahantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut prilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai

hasil kegiatan pemerintah. Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005 : 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Syukur dalam Surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) *target group* yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (*Implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "*street level bureaucrats*" untuk memberikan pelayanan atau mengatur prilaku kelompok sasaran (*target group*) Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan

a. Teori George C.Edwards III (2004)

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efiktif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah.

4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

b. Teori Merilee S. Grindle (1980)

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Wibawa (2005 :36) yang menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan (*konteks*) implementasi, kedua hal tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana. variabel isi kebijakan menurut Grindle mencakup beberapa indikator yaitu:

1) Kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan.
2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group.
3) Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan.
4) Letak pengambilan keputusan.
5) Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci, dan
6) Dukung oleh sumber daya yang dilibatkan.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup 3 indikator yaitu:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

2. Karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berkuasa.

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

c. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut meter dan horn, ada enam variable yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni:

1) Standar dan sasaran kebijakan.

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir.

2) Sumber daya.

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resourse*).

3) Hubungan antar Organisasi.

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan intansi lain.

4) Karakteristik agen pelaksana.

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola- pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon implementor terhadap

kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

d. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Dalam pandangan Weimer dan Vining (2007 : 396) ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni: logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementor kebijakan.

a) Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis.

b) Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan impelmentasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi,hankam, dan fisik atau geografis.

c) Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan.

2.1.3 Tahapan Implementasi Kebijakan

Tahapan implementasi kebijakan yang menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Disini akan dapat dipahami, bagaimana kinerja dari suatu kebijakan, bagaimana isi yang berinteraksi dengan kelompok sasaran dan bagaimana sejumlah faktor yang berasal dari lingkungan (politik, sosial dan lain-lainnya) berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan.

Meter dan Horn dalam Sujianto (2008 : 35) mengatakan, bahwa yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain :

a. Standar dan Tujuan Kebijakan (*Policy standars objecties*)

Standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja, maka identifikasi indikator-

indikator hasil kerja merupakan hal yang penting dalam analisis. Karena indikator ini menilai, sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan, ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus.

b. Sumberdaya Kebijakan (*Policy Resources*)

Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang digunakan untuk memudahkan administrasi. Sumberdaya yang dimaksudkan meliputi dana dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.

c. Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional (*Interoganizational Comunication and enforcement Activities*)

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Penyampaian informasi kebawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain, mau atau tidak komunikator baik secara sengaja atau tidak. Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur institusional di mana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten.

d. Karakteristik Pelaksana (*The Charactrristics of the Implementing Agencies*)

Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan, lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses

implementasi. Sumberdaya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal antara pelaksana dengan pembuat kebijakan.

e. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (Ekosospol). Pengaruh Eksospol terhadap kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama, walau dampak dari faktor ini baru sedikit mendapat perhatian. Tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan faktor Eksospol yaitu :

1) Apakah sumberdaya-sumberdaya ekonomi yang tersedia dalam organisasi pelaksana cukup memadai untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan.

2) Sejauhmana atau bagaimana kondisi-kondisi sosial ekonomi yang akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

3) Bagaimana sifat umum ; seberapa jelas masalah kebijakan yang terkait.

4) Apakah kelompok elite menyetujui atau menentang pelaksanaan kebijakan.

5) Apakah karakteristik pertisipan dari organisasi pelaksana ; ada oposisi atau dukungan partisipan untuk kebijakan tersebut.

f. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Variabel ini menyangkut masalah persepsi-persepsi pelaksana dalam juridis dimana kebijakan disampaikan. Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan:

1) Kognisi (pemahaman dan pengetahuan)

2) Arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak.

3) Intensitas dari respon pelaksana.

Enam variabel yang dikembangkan Meter dan Horn dalam menentukan keberhasilan implementasi, menunjukkan adanya pengaruh dari sikap para pembuat kebijakan sendiri, tetapi juga ada unsur-unsur yang eksternal yang masih melihat kehendak kelompok sasaran. Dengan demikian, akan ada keseimbangan yang menunjukkan keserasian antara program yang dibuat dengan kehendak kelompok sasaran. Ini dilakukan melalui komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksananya.

Grindle dalam Nugroho (2003:174) mengatakan tentang keberhasilan Implementasi kebijakan yaitu: setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *Implementability* dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan mencakup:

1) Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan
2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3) Derajat perubahan yang diinginkan
4) Kedudukan pembuat kebijakan
5) Siapa pelaksana program

Sementara itu situasi implementasinya adalah:

1) Kekuasaan, kepentingan dan akor yang terlibat
2) Karakteristik lembaga penguasa
3) Keputusan dan daya tanggap

Sujianto (2008 : 69) juga memiliki pendapat yang sama dengan George C.Edward, mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, kecuali Sujianto mengganti satu variabel yakni variabel struktur birokrasi dengan jenis manfaat yang diperoleh.

2.2 Tinjauan Tentang Pengelolaan Sampah

2.2.1 Pengertian Pengelolaan Sampah

Merujuk pada Undang-Undang RI No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dimaksud dengan “sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat”. Menurut Agung Suprihatin penggolongkan sampah yaitu:

a. Sampah Organik

Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik seperti sampah dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, daun.

b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik berasal dari sumberdaya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi atau dari proses industri. Beberapa bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam jangka waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa botol, botol plastik, tas plastik, kaleng.

Pengelolaan Sampah menurut UU No 18 Tahun 2008 yaitu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan:

1) Pembatasan timbunan sampah
2) Daur ulang sampah
3) Pemanfaatan sampah

Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan:

1) Pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah dan atau sifatnya.
2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah ke tempat penampungan sementara atau tepat pengolahan sampah terpadu.
3) Pengangkutan dalam bentuk sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat penampungan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

2.2.2 Kebijakan dan Strategi Pengelolaan sampah

Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah pada bab II tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah, yaitu:

Pasal 4

1) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah.

2) Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

3) Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.

Pasal 5

1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:

a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah b. program pengurangan dan penanganan sampah.

2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat:

a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan

b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

Pasal 8

1. Kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

2. Dalam menyusun kebijakan strategi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 9

1. Pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

2. Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. pembatasan timbulan sampah
b. pendauran ulang sampah
c. pemanfaatan kembali sampah
d. pemilahan sampah
e. pengumpulan sampah
f. pengangkutan sampah
g. pengolahan sampah
h. pemrosesan akhir sampah
i. pendanaan.

3. Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

2.3 Tinjauan Tentang Bank Sampah

2.3.1 Pengertian Bank Sampah

Secara istilah, Bank Sampah terdiri dari atas 2 (dua) kata, yaitu Secara istilah Bank Sampah terdiri atas 2 (dua) kata, yaitu kata Bank dan Sampah. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banque yang berarti tempat penukaran uang. Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankkan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank.

Kemudian Menurut peraturan Menteri Negara RI No 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recyele melalui Bank Sampah pada pasal 1 disebutkan bahwa Bank Sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Cara kerja bank sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya, ada nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen pengelolaannya, apabila dalam bank yang biasa kita kenal yang disetorkan nasabah adalah uang akan tetapi dalam bank sampah yang disetorkan adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan pengelola bank sampah harus orang yang kreatif dan inovatif serta memiliki jiwa kewirausahaan agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sistem kerja bank sampah pengelolaan sampahnya berbasis rumah tangga, dengan memberikan reward kepada yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah sampah. Konsep bank sampah mengadopsi menajemen bank pada umumnya. Selain bisa sebagai sarana untuk melakukan gerakan penghijauan, pengelolaan sampah juga bisa menjadi sarana pendidikan gemar menabung

untuk masyarakat dan anak- anak. Metode bank sampah juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat agar peduli terhadap kebersihan.

Nasabah bank sampah adalah individu, komunitas/ kelompok yang berminat menabungkan sampahnya pada bank sampah. Individu biasanya perwakilan dari kepala keluarga yang mengumpulkan sampah rumah- tangga. Komunitas/ kelompok, adalah kumpulan sampah dari satu rukun tetangga (RT), atau sampah dari sekolah-sekolah dan perkantoran.

2.3.2 Manajemen Bank Sampah

Cara menabung pada bank sampah adalah setiap nasabah mendaftarkan pada pengelola, pengelola akan mencatat nama nasabah dan setiap anggota akan diberi buku tabungan secara resmi. Bagi nasabah yang ingin menabung sampah, caranya cukup mudah, tinggal datang ke kantor bank sampah dengan membawa sampah, sampah yang akan ditabung harus sudah dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya seperti kertas, plastik, botol, kaleng, besi, alumunium dan lainnya dimasukkan kekantong-kantong yang terpisah.

Sampah yang akan ditabung harus dalam kondisi bersih dan kering. Petugas teller akan melakukan penimbangan, pencatatan, pelabelan dan memasukkan sampah pada tempat yang telah disediakan. Nasabah yang sudah menabung dapat mencairkan uangnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati misalnya 3 bulan atau 5 bulan sekali dapat mengambil uangnya. Sedangkan jadwal menabung ditentukan oleh pengelola. Pencatatan dibuku tabungan akan menjadi patokan berapa uang yang sudah terkumpul oleh masing-masing nasabah, sedang pihak bank sampah memberikan harga berdasarkan harga pasaran dari pengepul sampah. Berbeda dengan bank pada umumnya menabung pada bank sampah tidak mendapat bunga. Untuk keperluan administrasi dan upah pekerja pengelola akan memotong tabungan nasabah sesuai dengan harga kesepakatan. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh bendahara.

2.3.3 Manfaat Bank Sampah

Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menajdi banrng ekonomis. Manfaat sampah untuk masayarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan menukarkan sampah merekan akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulakn dalam rekening yang mereka miliki dam masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya saat tabungannya sudah terkumpul banyak, imbalan yang diberikan kepada penabung tidak hanya berupa uang, tetapi ada pula yang berupa bahan makanan pokok seperti gula, sabun, minyak dan beras.

2.3.4 Peranan Bank Sampah

Peranan Bank Sampah adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, mengeruangi timbulnya sampah, menciptakan lingkungan bersih, indah, dan sehat serta menciptakan lapangan kerja. Sesuai amanat Undang-undang No 18 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Proses penyadaran lingkungan melalui tabungan sampah yang dinilai dengan uang atau Rupiah merubah paradigma masyarakat tentang sampah. Sampah yang seharusnya dibuang menjadi bermanfaat.

2.3.5 Tahapan Mendirikan Bank Sampah

Bank sampah akan menjadi salah satu solusi untuk bisa membuat masyarakat menjadi mandiri dan memilki rasa kepeduluan dalam melihat lingkungan yang ada di sekitarnya dengan itu adapun tahapan- tahapan untuk bisa mendirikan bank sampah antara lain ialah:

a. Tahapan Persiapan

- Analisa, adalah proses perancangan untuk bisa memunculkan sebuah bisnis usaha bank sampah.

- Survey, ialah suatu kegiatan yang langsung turun ke lokasi atau tempat untuk bisa mencari dan mendapatkan data calon nasabah, menemukan tempat untuk bisa dijadikan wadah untuk masyarakat menabung sampah.
- Jaringan Kegiatan, ialah proses dimana saat mencari jaringan dan data-data pengepul sampah berbasis besar, calon pembeli kompos dan lain-lainnya.
- Sponsorship, ialah kegiatan untuk mencari calon yang bisa diajak untuk bisa bekerjasama dalam mensponsorkan kegiatan biasanya ada dari pemerintah daerah ataupun perusahaan.

b. Tahapan Launching

- Grand Launching, ialah sebuah kegiatan untuk mengenalkan bank sampah yang baru dibuat di suatu acara sosial yang dihadiri masyarakat secara massif dan pejabat-pejabat setempat.
- Promosi, ialah sebuah kegiatan yang berbaur dengan masyarakat dimana dalam proses ini akan dikenalakan dengan program-program yang dibuat secara menarik dan menggiurkan untuk bisa mengajak masyarakat untuk ikut bersosialisai sebagai nasabah di bank sampah.
- Kampanye, ialah kegiatan sosialisasi yang berniat untuk menyadarkan masyarakat secara terus menerus.

c. Tahap Pelaksanaan

- Oprasional, ialah kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti memberikan pelayanan kepada nasabah, memilah milih sampah, menjual barang yang sudah terkumpul ke pengepul pesar atau pabrik, marketing, meeting dan koordinasi.
- Investasi, ialah kegiatan untuk menambah sistem kerja atau kapasitas usaha dengan diadakannya mesin, selain itu ada juga kerjasama dan pemasukan modal yang berasal dari donator.
- Adapun kegiatan lainnya yaitu bekerjasamaa dengan bank agar bisa membantu dalam pembuatan atm.

d. Tahap Development

- Evaluasi, ialah kegiatan yang mencoba melihat bagaimana perkembangan dari bank sampah dari semula sampai saat ini.
- Improvement, ialah kegiatan kemajuan organisasi dari sisi produksi, marketing, keuangan dan oprasional, untuk memastikan apakah bank sampah akan berjalan dengan baik untuk 1-5 tahun mendatang

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan susunan kontruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Kerangka pemikiran dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik.

Masalah sampah menjadi salah satu hal krusial yang dihadapi kota Metro, padahal kota itu termasuk yang jumlah penduduk dan luas wilayahnya kecil. Dengan jumlah penduduk sekitar 160.000 jiwa, Kota Metro memproduksi sampah 102,71 ton per hari, dan rata-rata perkiraan 80 ton/hari yang masuk ke pembuangan akhir sampah (TPAS) di Karang Rejo. Selain itu, mendorong unit usaha Bank Sampah di setiap kelurahan yang dikelola pemerintah dengan swadaya masyarakat, membuat pusat daur ulang sampah dan tempat pemrosesan sementara dengan prinsip 3R (reduce, reuse and recycle), hingga aturan tegas tentang sampah.

Kota Metro baru saja meresmikan Bank Sampah dalam upaya pengelolaan sampah yang ada di Kota Metro. Bank Sampah NUSA merupakan gerakan sampah menjadi rupiah. Artinya, sampah dengan jenis seperti plastik, logam, hingga besi dikumpulkan kemudian dijual, hasil dari penjualan diberikan ke masyarakat yang menjualnya. Bank sampah ini merupakan satu bentuk upaya dalam penanganan sampah Kota Metro. Pemahaman yang diharapkan dari masyarakat tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tetapi harus lebih luas lagi, yakni memilah sampah organik maupun non organik, sebelum ke tempat pembuangan sampah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teori dan komponen Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

(1) komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efiktif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah.

4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Jadi, di dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Implementasi dari Edward III yang mengatakan untuk mengukur implementasi kebijakan dapat diukur melalui 4 (empat) indikator implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

Adapun bagan kerangka Pikir sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

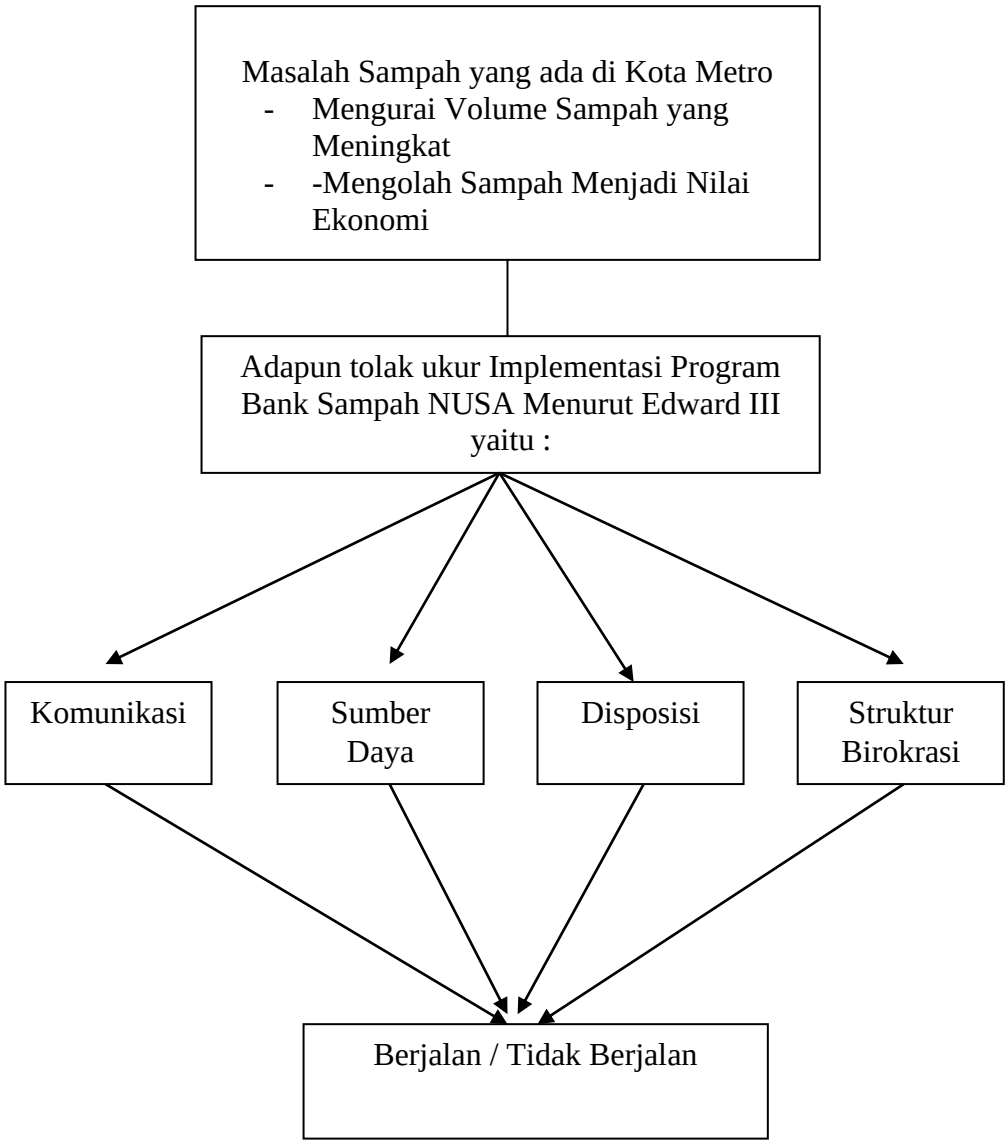

(*Sumber : Diolah Peneliti, 2022*)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe penelitian

Penelitian yang berjudul “Implementasi Program Bank Sampah Induk Nuwo Sampah (Studi di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro)” menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Lexy & Moleong, 2014).

Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistic kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiarto, 2015). Burhan Bungin dalam (Ibrahim, 2015) juga mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah proses kerja penelitian yang sasarannya terbatas, namun kedalaman datanya tidak terbatas, semakin dalam dan berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas hasil penelitian tersebut.

3.2 Fokus Penelitian

Spradley mengemukakan bahwa fokus adalah domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini berfokus menggunakan indikator implementasi kebijakan dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

1) komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Kemudian harus ada transmisi, kejelasan, dan konsistensi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro agar nantinya Bank Sampah Nusa dapat berjalan semestinya dan sesuai dengan yang diharapkan.

2) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efiktif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Memiliki sumber daya seperti staf, informasi, dan fasilitas yang menunjang program bank sampah nusa.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Bagaimana Pengangkatan/ penunjukan struktur pengurus dari bank sampah serta berasal darimana uang insentif untuk pengurus bank sampah nusa.

4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang

(standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

3.3 Informan

Informan pada sebuah penelitian, dapat diartikan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sehingga, informan tersebut harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal (Moleong & Lexy, 2017). Informan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
2. Pengurus TP PKK Kelurahan Rejomulyo
3. Pengurus Bank Sampah Nusa Kelurahan Rejomulyo
4. Masyarakat Nasabah Bank Sampah Kelurahan Rejomulyo

Adapun alasan peneliti memilih infoman di atas, dikarenakan menurut peneliti informan tersebut berkompeten untuk dapat menjawab persoalan yang terdapat pada penelitian ini. Dimana para informan di atas merupakan orang-orang yang berkompeten di bidangnya.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian yang diperoleh melalui dua sumber data (Sugiyono, 2016, p. 225).

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang ditentukan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan. Saat menetapkan informan, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni dengan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam penelitian.

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan data yang melengkapi informasi yang didapat dari sumber data primer berupa buku-buku, jurnal, artikel, produk hukum, website, dan sebagainya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2018, p. 38). Mc Milan dan Schumacher mengemukakan beberapa instrument untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif antara lain observasi partisipasan, observasi bidang/lapangan, wawancara mendalam dan dokumen dan artefak teknik tambahan seperti audio visual. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi (Suharsaputra, 2014) sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2016, p. 231). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data pada penelitian ini karena dengan melakukan wawancara dapat berinteraksi langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini, wawancara yang akan dilakukan meliputi wawancara terstruktur (structured interview). Melalui wawancara terstruktur, artinya telah menyiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan dan wawancara semiterstruktur (semistructure interview) atau wawancara in depth interview, yakni pelaksanaannya lebih bebas dan tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. Wawancara mendalam merupakan suatu interaksi atau pembicaraan yang terjadi antara satu orang pewawancara dengan satu orang informan (Manzilati, 2017).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017, p. 219). Alasan penelitian ini menggunakan dokumentasi dalam pengumpulan data sebagai bukti yang riil bahwa telah melakukan penelitian ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara yang telah dibuat dan observasi sehingga mendapatkan data atau jawaban yang diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan. Dokumentasi juga dapat berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang lama.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Teknik pengelohan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Editing Data

   Tujuan dalam proses editing data adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sejauh mungkin (Narbuko & Achmadi, 2016, p. 153). Proses editing merupakan proses dimana peneliti melakukan proses pengecekan atau klarifikasi dari data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yaitu wawancara observasi dan dokumentasi di lapangan.

2. Interpretasi Data

   Interpretasi data pada penelitian ini yaitu melakukan pembahasan atau hasil dengan kata lain berarti menjelaskan dan menemukan makna hasil analisis dengan tujuan teoritis dan praktis penelitian (Silalahi, 2012). Penelitian ini akan menjabarkan data yang ada melalui tahap editing kemudian diberikan penjelasan atau penafsiran serta dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sebagai bahan jawaban terhadap permasalahan penelitian (Hikmawati, 2017, p. 193). Analisis data menurut Bogdan & Biklen dalam (Lexy & Moleong, 2014, p. 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, *display* (Penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut (Miles & Huberman, 2014, p. 16) yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, dan memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari jika diperlukan.

2. Penyajian Data (*display data*)

Penyajian data dapat membantu dalam memahami apa yang terjadi di lapangan. Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas kedalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah ketepatan data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2016:246). Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan uji kredibilitas melalui triangulasi. Triangulasi dalam uji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang peneliti gunakan ialah yang dikembangkan oleh Denzim ada empat triangulasi sebagai teknik pemeriksaan

untuk mencapai keabsahan yaitu memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik serta teori (Moleong & Lexy, 2017, p. 331).

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kota Metro

Sejarah kelahiran Kota Metro bermula dengan dibangunnya sebuah induk desa baru yang diberi nama Trimurjo. Dibangunnya desa ini dimaksudkan untuk menampung sebagian dari kolonis yang didatangkan oleh perintah Hindia belanda pada tahun 1934 dan 1935, serta untuk menampung kolonis-kolonis yang akan didatangkan berikutnya.

Kedatangan kolonis pertama didesa Trimurjo yaitu pada hari sabtu tanggal 4 april 1936 yang ditempatkan pada bedeng-bedeng kemudian diberi penomoran kelompok bedeng, dan sampai saat ini istilah penomorannya masih populer dan masih dipergunakan oleh masyarakat Kota Metro pada umumnya. Setelah ditempati oleh para kolonis, daerah bukaan baru yang termasuk dalam kewedanaan sukadana yaitu Marga Unyi dan Buay Nuba ini berkembang dengan pesat. Daerah ini menjadi semakin terbuka dan penduduk kolonispun semakin bertambah, sementara kegiatan perekonomian mulai tambah dan berkembang.

Berdasarkan keputusan rapat Dewan Marga tanggal 17 Mei 1937 daerah kolonisasi ini dipisahkan dari hubungan marga. Dan pada Hari selasa tanggal 9 juni 1937 nama desa Trimurjo diganti dengan nama Metro. Tanggal 9 juni inilah yang menjadi dasar penetapan Hari Jadi Kota Metro, sebagaimana yang telah dituangkan dalam perda Nomor 11 Tahun 2002 tentang Hari Jadi Kota Metro.

4.1.1 Kondisi Geografis

Kota Metro secara geografis terletak pada 105,170-105,190 bujur timur dan 5,60-5,80 lintang selatan, berjarak 45 km dari Kota Bandar Lampung (Ibukota Provinsi Lampung).Wilayah Kota Metro relatif datar dengan

ketinggian antara 30-60 m diatas permukaan air laut. Beriklim hujan humid tropis .suhu udara berkisar antara 260-280, kelembaban udara rata-rata 80-88 % dan curah hujan per-tahun antara 2,264 mm – 2,868 mm. bulan hujan berkisar antara September sampai Mei.

Kota Metro memiliki Luas wilayah 68,74 km2 atau 6.874 ha, dengan jumlah penduduk 150.950 jiwa yang tersebar dalam 5 wilayah kecamatan dan 22 kelurahan dengan batas wilayah :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur/Way Sekampung.
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.

Pola penggunaan lahan di kelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu lahan terbangun dan tidak terbangun. Lahan terbangun terdiri dari kawasan pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas perdagangan dan jasa, sedangkan lahan tidak terbangun terdiri dari persawahan, perladangan, dan penggunaan lainnya. Kawasan tidak terbangun didominasi oleh persawahan dengan sistem irigasi teknis seluas 2.968,15 hektar atau 43,38% dari luas wilayah, selebihnya adalah lahan kering pekarangan, tegalan dan sawah non irigasi.

Transportasi di Kota Metro didukung dengan jaringan jalan yang baik, terminal dan sarana angkutan umum yang memadai. Total panjang jalan di Kota Metro mencapai 434,36 km, terdiri dari Hotmik 96,705 km, Penetrasi 145,314 km, Onderlagh 156,444 km, Sirtu 3,710 km, Tanah 62,298 km dan Paving Blok 41,451 km. Untuk mendukung pelayanan angkutan penumpang

dan barang, Kota Metro memiliki 2 buah terminal, yaitu terminal kota yang terletak di Metro Pusat dan terminal induk di Mulyojati, Metro Barat.

Kota Metro memiliki prospek perdagangan yang cukup baik dan kondisi keamanan yang sangat kondusif. Letaknya yang cukup strategis dan mudah dijangkau dari berbagai arah, sehingga tidak saja melayani kebutuhan warga Metro tetapi juga warga Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, serta daerah lainnya. Perdagangan di Kota Metro berpusat di dua pasar utama yaitu Shoping Centre, dan Pasar Cendrawasih. Selain itu terdapat beberapa pasar yang tersebar di berbagai wilayah Kota Metro dan mempunyai prospek yang cukup menjanjikan, yaitu Pasar Kopindo, Pasar 16 C, Pasar Sumbersari Bantul, Pasar Ganjar Agung , Pasar Pagi Purwosari, Pasar Ayam Hadi Mulyo, Pasar Tejo Agung, dan pasar swalayan yang terletak di beberapa tempat.

4.1.2 Visi & Misi Kota Metro

Visi Kota Metro

Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya

Memperhatikan visi diatas maka ada 4 pokok visi yang akan menjadi inti dalam pelaksanaan pembangunan 5 tahun ke depan . Adapun pokok pokok visi tersebut adalah :

1. Kota Metro Berpendidikan

Kota Metro Berpendidikan diwujudkan dengan membentuk Generasi Emas Metro Cemerlang (GEMERLANG), yaitu masyarakat cerdas yang mempunyai daya saing di tingkat nasional dan global dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila.

2. Kota Metro Sehat

“ Kota Metro Sehat diwujudkan dengan membangun masyarakat yang sehat secara jasmani, rohani dan sehat secara sosial. Dengan fisik dan jiwa sehat, diharapkan masyarakat dapat berinteraksi sosial tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal. Metro Sehat akan dilaksanakan melalui peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kehidupan beragama dan budaya gotong-royong.”

3. Kota Metro Sejahtera

“ Kota Metro Sejahtera merupakan kondisi masyarakat Kota Metro yang makmur dengan pendapatan yang baik sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasani, rohani dan sosial untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Kota Metro Sejahtera akan diwujudkan melalui penguatan perekonomian lokal yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat Kota Metro. Penguatan perekonomian lokal dilakukan dengan membentuk masyarakat yang produktif dan berdaya saing melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi.”

4. Kota Metro Berbudaya

“ Kota Metro Berbudaya merujuk pada perilaku masyarakat Kota Metro agar memiliki dan secara alamiah mengedepankan sikap yang berbudaya dalam kehidupan sehari-hari. Berbudaya akan diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun dalam sistem pemerintahan sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa menghilangkan jati diri sebagai anak bangsa. “

Misi Kota Metro

1. Mewujudkan Kualitas Pendidikan dan Kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan
2. Mewujudkan Masyarakat sehat jasmani, rohani & sosial
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan

4. Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang ekonomi kreatif dan wisata keluarga

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat

4.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup kota Metro

4.2.1 Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro. Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro pada 01 Januari s.d 12 Agustus 2017 berkedudukan di Jl. A.H. Nasution No. 5 Kota Metro dan setelah Tanggal 12 Agustus s.d 20 Desember 2017 berkantor sementara di Gedung Sesat Kota Metro Jl. Jendral Sudirman, kemudian terhitung mulai Tanggal 21 Desember 2017 Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan sekarang mempunyai dan menempati gedung di Lokasi Jl. Tongkol No. 40 Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Telp. (0725) 7851666.

4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, dan kehutanan serta melaksanakan fungsi penunjang bidang kebersihan berdasarkan azas otonomi daerah dan pembantuan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Metro. Dan Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, dan kehutanan serta bidang kebersihan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, dan kehutanan serta bidang kebersihan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perizinan dan pengawasan, bidang kebersihan dan pengelolaan sampah, dan bidang Pengendalian, Pemantauan, dan Kemitraan, serta kelompok jabatan fungsional;
d. Pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan dinas;dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2.3 Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang dan seorang Kepala UPT. TPA dan IPLT. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat lintas bidang dibantu oleh 2 (dua) yaitu Kasubbag Perencanaan dan Keuangan serta Kasubbag Umum dan Kepegawaian. Selain itu Kepala Dinas juga dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bidang, yang masing-masing kepala bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi. Sedangkan Kepala UPT dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala TU.

Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro keseluruhan sampai dengan Bulan Desember 2021 adalah 262 (dua ratus enam puluh dua) pegawai yang terdiri atas 88 (delapan puluh delapan) Pegawai Negeri Sipil dan 174 (seratus tujuh puluh empat) Tenaga Kontrak.

Adapun jumlah rincian pegawai tersebut adalah :

A. Sekretariat : 27 Pegawai

B. Bidang Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup : 10 Pegawai

C. Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan : 10 Pegawai

D. Bidang Pengelolaan Sampah : 20 Pegawai

E. UPT TPAS dan IPLT : 12 Pegawai

F. Petugas Kebersihan

1. Pengawas Lapangan : 2 Pegawai
2. Teknisi Sarana dan Prasarana : 14 Pegawai
3. Pramu Kebersihan : 35 Pegawai
4. Operasional Kebersihan : 131 Pegawai
5. Penagih Retribusi : 1 Pegawai

PNS Berjumlah : 88 Pegawai

THL / Tenaga Kontrak Berjumlah : 174 Pegawai

TOTAL KESELURUHAN : 262 Pegawai

4.2.4 Struktur Jabatan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

Tabel 4.1 Struktur Jabatan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

No	Nama	Jabatan
1	Ir. Irianto Marhasan	Kepala Dinas
2	Yerri Noer Kartiko ST, MT	Sekretaris
3	Ika Rahmawati P, S.Si	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4	Dessy Riana	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5	Defriansyah, S.STP, M.Si	Kabid Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup

6	Agus Dwi Hartono, S.ST	Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup
7	Yulimah, ST	Kasi Pengawasan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8	Ismadi Sumiarso, S.Sos	Kasi Penataan Lingkungan Hidup
9	Dedy Alfian, SH, M.H.	Kabid Pengelolaan Sampah
10	Arivanda Jaya, S.KM,.ME	Kasi Penanganan Sampah
11	Erfano Agustian, SP, M.Si	Kasi Pengelolaan Tempat Sampah Terpadu
12	Esther Adhiyati, ST, MM	Kasi Data Persampahan
13	Edward MZ, S.T.MM	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
14	Arif Radigusman, ST, M.Si	Kasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup
15	Nuril Anwar, SP	Kasi Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup
16	Desna Amanah, ST, MT	Kasi Kemitraan Lingkungan Hidup
17	Supriyanto, S.Si	Kepala UPT TPAS & IPLT
18	Yohanes Indra K, SE	Kasubag UPT TPAS & IPLT

Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2022)

4.2.5 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

Visi Pembangunan Daerah 2021-2026

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi Pembangunan Kota Metro Tahun 2021-2024 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih, yaitu Dr. H. Wahdi, Sp.OG dan Drs. H. Qomaru Zaman, MA yang selanjutnya menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Visi ini juga disusun mengacu pada RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025 dimana Kota Pendidikan dan Masyarakat Sejahtera menjadi tujuan akhir

pembangunan pada Tahun 2025. Dalam periode 2021-2026, visi pembangunan Kota Metro adalah “Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”

Memperhatikan visi di atas, maka ada 4 pokok visi yang akan menjadi inti dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan. Adapun pokok-pokok visi tersebut adalah :

1) Kota Metro Berpendidikan

Kota Metro Berpendidikan diwujudkan dengan membentuk Generasi Emas Metro Cemerlang (GEMERLANG), yaitu masyarakat cerdas yang mempunyai daya saing di tingkat nasional dan global dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila. Pembentukan Generasi Emas Metro Cemerlang akan dilaksanakan dengan membangun dan memperkuat Intelligence Quotient atau IQ (kecerdasan intelektualitas yang menjadi tolok ukur berkehidupan dalam masyarakat); Spiritual Quotient atau SQ (kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan jiwa yang membantu untuk mengembangkan diri dengan nilai-nilai positif); dan Emotional Quotient atau EQ (kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menerima, menilai, dan mengelola serta mengontrol diri dan orang lain di sekitarnya dalam kehidupan bermasyarakat).

2) Kota Metro Sehat

Kota Metro Sehat diwujudkan dengan membangun masyarakat yang sehat secara jasmani, rohani dan sehat secara sosial. Dengan fisik dan jiwa sehat, diharapkan masyarakat dapat berinteraksi sosial tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan local. Metro Sehat akan dilaksanakan melalui peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kehidupan beragama dan budaya gotong-royong.

3) Kota Metro Sejahtera

Kota Metro Sejahtera merupakan kondisi masyarakat Kota Metro yang makmur dengan pendapatan yang baik sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasani, rohani dan sosial untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Kota Metro Sejahtera akan diwujudkan melalui penguatan perekonomian local yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat Kota Metro. Penguatan perekonomian local dilakukan dengan membentuk masyarakat yang produktif dan berdaya saing melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi.

4) Kota Metro Berbudaya

Kota Metro Berbudaya merujuk pada perilaku masyarakat Kota Metro agar memiliki dan secara alamiah mengedepankan sikap yang berbudaya dalam kehidupan sehari-hari. Berbudaya akan diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun dalam sistem pemerintahan sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa menghilangkan jati diri sebagai anak bangsa.

Misi Pembangunan Tahun 2021-2026

Dalam rangka mencapai Visi “Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
2. Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.
3. Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
4. Misi 4 : Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif.

5. Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat.

Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro terdapat pada Misi 3

Misi 3

“Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan”

Komitmen perwujudan Misi 3 akan dilaksanakan melalui :

1. Meningkatkan sistem dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan;

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana persampahan dengan sistem pengelolaan sampah terpadu;

3. Meningkatkan Sistem Penerangan Lingkungan;

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi di ruang publik dan permukiman sebagai bentuk fasilitasi adaptasi terhadap perubahan global;

5. Mengembangkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Program Kerja :

1. Revitalisasi Stadion Tejosari;
2. Pembangunan gedung pelayanan publik terpadu;
3. Meningkatkan infrastruktur sanitasi dan lingkungan;
4. Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat;
5. Peningkatan kualitas jalan dan drainase yang terintegrasi
6. Peningkatan infrastruktur penerangan lingkungan.

Urusan yang mengampu pelaksanaan Misi 3 : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Komunikasi dan Informatika; dan urusan Fungsi Penunjang.

4.3 Gambaran Umum Bank Sampah NUSA Kota Metro

4.3.1 Sejarah Bank Sampah NUSA

Berdasarkan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan.

Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan; pengelolaan sampah dapat dilakukan secara sinergis melalui bank sampah.

Bank Sampah NUSA (Nuwo Sampah) adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular. Pada awalnya Bank Sampah NUSA dibentuk dan dikelola oleh Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kota Metro yang dibantu secara teknis oleh MYLS (Metro Youth Leadership Summit). Bank Sampah Unit (BSU) adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah kelurahan dan OPD. Bank Sampah Induk (BSI) adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif kota Metro. Bank Sampah harus memenuhi persyaratan yaitu:

a. Pengelolaan sampah,

b. Tata kelola bank sampah.

4.3.2 Pengelolaan dan Fasilitas Bank Sampah

1. Jenis-jenis sampah

Pengelolaan sampah meliputi pengurangan, pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah anorganik. Jenis-jenis sampah anorganik yang diterima oleh Bank Sampah NUSA adalah sampah yang dapat diguna ulang seperti:

- Kertas (Koran, majalah, kardus dan dupleks)
- Plastik (plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lain)
- Logam (Besi, alumunium dan timah)

Sedangkan sampah yang tidak atau **belum diterima** Bank Sampah NUSA adalah:

- Styrofoam
- Mika kue
- Botol wipol
- Plastik bowl (butek, biasa untuk wadah tekwan)
- Beling/kaca
- Limbah B3
- Platik multilayer/kemasan makanan yang tidak bening
- Plastik keras bekas produk elektronik, sanitary, dll
- Karet
- Tekstil

b. Pemilahan sampah

Pemilahan sampah dilakukan pada sumber sampah yaitu rumah tangga, perkantoran, café/rumah makan, maupun tempat penginapan. Jika pemilahan tidak maksimal maka akan dipilah lagi oleh Bank Sampah Unit. Pengolahan sampah dilakukan melalui pengomposan, daur ulang materi dan daur ulang energi.

c. Daur ulang

Pengolahan sampah Daur ulang saat ini yang bias dikembangkan adalah ekobrik dan kompos. Pengurus Bank sampah agar dapat mensosialisasikan kemasyarakat untuk membuat ekobrik yang isinnya berupa sampah plastic yang tidak diterima oleh bank sampah seperti plastic multi layer/kemasan makanan atau plastic kresek/plastic yang TIDAK bening.

Masyarakat juga dapat membuat kompos dari sampah organik seperti daun kering, sisa bahan makanan. Akan dihasilkan pupuk kompos dan pupuk cair yang dinilai lebih ramah pada tanah.

Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit Kelurahan harus memenuhi syarat, antara lain:

1. Memiliki sarana untuk mengelompokkan sampah berdasarkan jenis sampah.
2. Dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana
3. Tidak mencemari lingkungan
4. Luas lokasi dan kapasitas Pengelolaan Sampah sesuai kebutuhan;
5. Lokasi mudah diakses
6. Memiliki alat transportasi sampah;

4.3.3 Struktur Kelembagaan

Sistem organisasi merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan Bank Sampah. Strukur organisasi Bank Sampah harus memperhatikan kewenangan dan tanggung jawab yang diletakkan pada tiap jabatan. Dalam pembentukan struktur kelembagaan tidak ada unsur yang baku. Namun yang harus diperhatikan, dalam susunan organisasi perlu adanya personel yang menjalankan fungsi utama pelaksanaan Bank Sampah. Berikut adalah struktur kelembagaan Bank Sampah Induk NUSA.

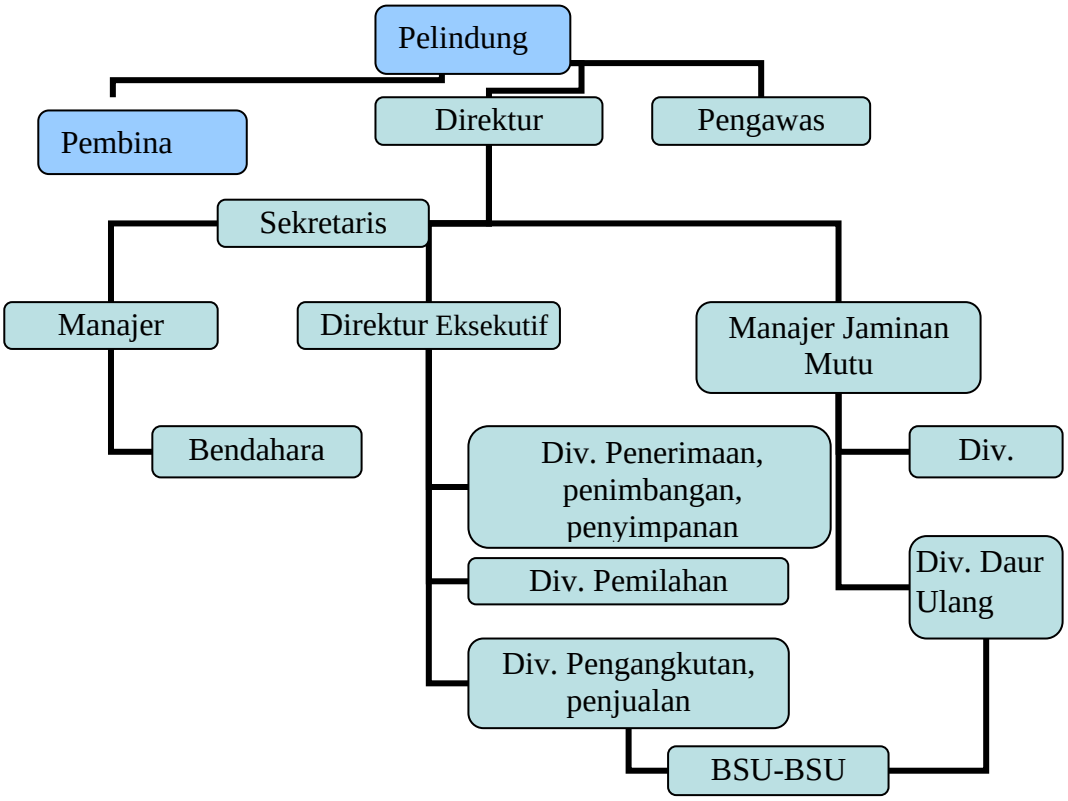

Gambar 4.1: Bagan Struktur Kepengurusan Bank Sampah Induk NUSA
Sumber : Bank Sampah NUSA (2022)

Uraian tugas dan Tanggung jawab masing-masih posisi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tugas dan Fungsi Pengurus Bank Sampah NUSA

No	Jabatan	Tugas
1.	Pengawas	1. Menjaga dan memastikan pelaksanaan kerja dan kegiatan Bank Sampah Nuwo Sampah sesuai dengan visi, misi dan tujuan. 2. Memberikan masukan kepada penanggung jawab (Manajer utama) dalam menetapkan program Bank Sampah selanjutnya 3. Memberikan masukan kepada Penanggung Jawab (Manajer utama) dalam pelaksanaan Program Bank Sampah yang telah berjalan 4. Melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada seluruh pengurus dalam hal penjagaan kondisi persatuan dan kesatuan serta motivasi berorganisasi para pengurus.
2.	Direktur utama	1. Bertanggung jawab untuk semua aktivitas Bank Sampah Nuwo Sampah; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi minimal 1 (satu) bulan sekali dengan melakukan rapat pengelola Bank Sampah; 3. Menetapkan sasaran yang mendapatkan penghargaan berdasarkan hasil monev; 4. Melakukan koordinasi dan advokasi untuk menjalin kerja sama dengan Pemerintah atau Badan Usaha.
3	Sekretaris	1. Bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen dan pengarisipan data Bank Sampah; 2. Bertanggung jawab atas tuigas administrasi; 3. Membuat hasil monitoring dan evaluasi bulanan; 4. Melaporkan kepada manajer utama; 5. Berkoordinasi dengan manajer eksekutif dan manajer jaminan mutu terkait dokumen kerja tiap divisi
4	Manajer Keuangan	1. Mengelola semua aktvitas keuangan dan bertanggung jawab terhadap *cashflow* Bank Sampah; 2. Melakukan pembukuan transaksi Bank Sampah melalui buku kas dan buku tabungan nasabah; 3. Bertanggung jawab terhadap tugas bendahara 4. Melaporkan ke manajer utama
5	Manajer Eksekutif	1. Mengawasi pelaksanaan tugas divisi penerimaan, penimbangan dan penyimpanan, divisi pemilahan, dan divisi pengangkutan dan penjualan; 2. Menyediakan data pengepul/pembeli Sampah; 3. Pengurusan perizinan usaha Bank Sampah

		4. Melaporkan kepada manajer utama.
6	Manajer Jaminan Mutu	1. Melakukan pemantauan kualitas produk dan kualitas usaha Bank Sampah; 2. Menyusun program kerja sama dengan Instansi Pemerintah/ Badan Usaha; 3. Bertanggung jawab terhadap divisi humas dan divisi daur ulang; 4. Berinovasi terhadap produk daur ulang 5. Melaporkan kepada manajer utama.
7	Bendahara	1. Membuat laporan terkait keuangan 2. Membantu manajer keuangan
8	Wakil Sekretaris	1.Membuat dokumen dan pengarsipan; 2.Bertanggung jawab atas database BSU (Bank Sampah Unit) 3.Membantu sekretaris dalam administrasi lainnya.
9	Divisi Penerimaan, Penimbangan dan Penyimpanan	1. Melakukan registrasi untuk BSU baru; 2. Menerima sampah yang disetor dari BSU ; 3. Melakukan penimbangan sampah di lokasi BSU; 4. Mencatat jumlah sampah berdasarkan jenis di buku tabungan BSU; 5. Mencatat jumlah sampah berdasarkan jenis di buku besar 6. Memastikan kondisi ruang penyimpanan sampah induk sesuai dengan persyaratan 7. Berkoordinasi dengan divisi pengangkutan dan penjualan terkait dengan penjemputan sampah ke BSU; 8. Berkoordinasi dan menyerahkan sampah yang sudah tercatat ke divisi pemilahan 9. Melaporkan kepada manajer eksekutif.
10.	Divisi pemilahan Sampah	1. Menerima dan mencatat sampah dari divisi penerimaan, penimbangan dan penyimpanan 2. Melakukan pemilahan lanjutan berdasarkan jenis sampah yang diterima untuk siap dijual ke pelapak. 3. Bertanggung jawab terhadap tenaga pemilah 4. Mencatat hasil pemilahan sebagai dasar untuk pembayaran tenaga pemilah 5. Menyiapkan sampah yang akan dilakukan daur ulang 6. Melaporkan kepada manajer eksekutif

11.	Divisi pengangkutan dan penjualan	1. Melakukan penjemputan dan sampah dari BSU ke bank sampah induk; 2. Mengantarkan sampah ke pelapak dan mencatat hasil penjualan 3. Melaporkan hasil penjualan ke bendahara 4. Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kenderaan 5. Melaporkan kepada manajer eksekutif
12.	Divisi Humas	1. Pengurusan perizinan usaha Bank Sampah Induk 2. Menyusun program kerja sama dengan Instansi Pemerintah/ Badan Usaha; 3. Melakukan edukasi/ penyuluhan 3R pengelolaan Sampah organik dan anorganik minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; 4. Berkoordinasi dengan Divisi humas BSU untuk mencari nasabah 5. Melaporkan kepada manajer jaminan mutu 6. Marketing program /sosialisasi bank sampah
13.	Divisi Daur ulang	1. Membuat program kerja daur ulang sampah 2. Melakukan pengolahan sampah berupa pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energi; 3. Melakukan pencatatan sampah yang telah dilakukan pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energi; dan 4. Sosialisasi program kerja daur ulang sampah 5. Bertanggung jawab dalam mengkoordinasi pemanfaatan Sampah melalui pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan Sampah; dan 6. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada manajer jaminan mutu

Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2022)

4.3.4 Tata Kelola Bank Sampah NUSA

1. Penetapan Harga

- Penetapan harga setiap jenis sampah berdasarkan harga pasar yang disurvei oleh BSI
- Secara berkala BSI melaporkan update harga ke BSU.
- Berat minimum sampah yang ditabung minimal 1 kg untuk sampah yang tidak terpilah (gabruk), jika sampah sudah terpilah berdasarkan jenis sampah minimal diterima 0,5 kg.

2. Buku yang harus disiapkan

Bank Sampah Induk**:**

1. Buku besar database BSU
2. Buku Tabungan Sampah
3. Buku Besar Penjualan
4. Buku Kas/neraca
5. Buku Rekapitulasi

Bank Sampah Unit:

1. Buku besar databaseNasabah
2. Buku Tabungan Sampah
3. Buku Besar Penjualan
4. Buku Kas/neraca
5. Buku Rekapitulasi

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan informasi dan data yang didapatkan, maka dapat ditarik kesimpulan penting dari penelitian ini yaitu bahwa pada dasarnya implementasi program bank sampah NUSA di Kelurahan Rejomulyo memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Sesuai dengan rumusan masalah utama dalam penelitian ini yang menggunakan model implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh George C. Edward III, yaitu model *direct and indirect impact on implementation*. Implementasi program bank sampah NUSA masih kurang berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya, ini terlihat dari pelaksanaan di lapangan terdapat kekurangan yang di alami, yaitu:

1. Komunikasi

   Indikator Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dan Pengurus Bank Sampah NUSA Kelurahan Rejomulyo belum berjalan dengan baik. Dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pengurus Bank Sampah masih belum secara rutin dilakukan sehingga masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang bank sampah.
2. Sumber daya

   Sumber daya Manusia dan Sumber daya Fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dan Bank Sampah NUSA Kelurahan Rejomulyo masih kurang memadai seperti masih belum adanya tempat penampungan sampah serta kendaraan pengangkut sampah yang telah terkumpul. Dan masih terdapat kekurangan terhadap sumber daya manusia di Bank Sampah NUSA Kelurahan Rejomulyo yaitu pegawai laki-laki.

3. Disposisi

   Pada Indikator Disposisi atau Sikap, dalam penerapan program bank sampah ini sikap pegawai yang ada di Bank Sampah NUSA didalam melayani masyarakat untuk dapat menabung di Bank Sampah dapat dikatakan cukup baik namun disamping itu tingkat kedisiplinan dalam segi waktu tidak cukup baik.

4. Struktur Birokrasi

   Struktur Birokrasi terkait program bank sampah ini sudah berjalan sesuai dengan *Standart Operating Procedures* atau SOP yang telah dibuat oleh Pemerintah.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian seperti yang telah dijelaskan diatas. Maka, peneliti dapat memberikan saran-saran kepada Pemerintah Kota Metro khususnya kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pengurus Bank Sampah NUSA agar dimasa yang akan datang dapat menjalankan program bank sampah tersebut seperti tujuan awal pembuatan kebijakan tersebut. Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain adalah:

1. Dalam Aspek Komunikasi, Pemerintah perlu adanya peningkatan dalam sosialisasi dan pembinaan pada masyarakat;
2. Dalam Aspek Sumber Daya, Pada pelaksanaan program dalam hal sarana dan prasarana perlu di tingkatkan.
3. Dalam Aspek Disposisi, Pemerintah hendaknya memberikan insentif kepada para implementor;
4. Dalam Aspek Struktur Birokrasi, Pemerintah Kota hendaknya melakukan perbaikan untuk mengatasi permasalahan program bank sampah dengan cara melakukan evaluasi secara berkala antara dinas dengan bank sampah di tingkatan masyarakat sehingga permasalahan yang ada segera dapat diselesaikan;

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik.* Bandung: CV Alfabeta

Abiding, Said Zainal. (2012). Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.

Damanhuri, Enri, dan Tri Padmi, 2010. *Buku Ajar teknologi Pengelolaan Sampah*. Bandung : Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

Mardikanto, Totok. dan Soebianto, Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik.* Bandung : CV Alfabeta.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suwerda, B. 2012. *Bank Sampah Kajian Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Rihama-Rohima.

Nugroho, Riant, 2009. *Public policy: Teori kebijakan-Analisis KebijakanProses*

Kebijakan-Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi-Risk Management dalam Kebijakan Publik-Kebijakan sebagai The Fifth Estate Metode Penelitian Kebijakan. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

JURNAL :

Amastang, M., & Amastang, M. (2019). *Analisis Normatif Sosiologis Pengelolaan Sampah Dengan Model Bank Sampah Di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar*

Arifa, F., Cita, F. P., & Ilman, A. H. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah Di Kabupaten Sumbawa. Nusantara Journal of Economics*, *1*(01), 14-27.

Asteria, D., & Heruman, H. (2016). *Bank sampah sebagai alternatif strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Tasikmalaya (Bank Sampah (Waste Banks) as an alternative of community-based waste management strategy in Tasikmalaya).* Jurnal manusia dan lingkungan, 23(1), 136-141.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro . 2021 . Data Perkiraan Timbulan Sampah Rata-rata Per hari Tahun 2021 di Kota Metro.

Ismawati, A. 2016 . *Gambaran Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Ukm Mandiri Di Rw 002 Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 2, No. 2, Hal. 58-74.

Kusminah, I. 2018. *Penyuluhan 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace) dan Kegunaan Bank Sampah sebagai Langkah Menciptakan Lingkungan Bersih dan Ekonomis di Desa Mojowuku Kabupaten Gresik*. Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 1, Hal. 22-28.

Linda, R. 2016. *Pemberdayaan Ekonomi Kreatif melalui Daur Ulang Sampah Plastik (Studi Kasus Bank Sampah Berlian Kelurahan Tangkerang Labuai).* Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 1, No.1, Hal. 17-24.

Permatasari, I. A. (2020). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). Thejournalish: Social And Government*, 1(1), 33-37.

Universitas Lampung. 2020. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

DOKUMEN :

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010